

PROFILE IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN ELEMENTARY SCHOOL AT KEBUMEN

Muhamad Chamdani

Universitas Sebelas Maret
muhamad_chamdani@staff.uns.ac.id

Article History

accepted 30/09/2018
approved 12/10/2018
published 30/10/2018

Keywords

*Profil implementasi,
Pendidikan Inklusi,
Sekolah Dasar*

Abstract

The purpose of this study is to : (1) the existence of children with special needs in elementary schools that organize inclusive education in Kebumen District, (2) inclusion index achieved in elementary schools that organize inclusive education in Kebumen District, and (3) Implementation of school inclusive education Basic in Kebumen Regency. Inclusion index is obtained through observation in the learning process in class based on 18 indicators. The study was conducted on 10 classes from 4 elementary schools in Kebumen District which organized inclusive education. Inclusive school implementation data were analyzed using an ideal instrument index. The results of the study show that ((1) the number of inclusive elementary school children varies from 1 to 3 children). ((2) The average inclusion index is 31.46 with the ideal inclusion index 54). ((3) Implementation of inclusive education is 227 with an ideal total score of 381). The conclusion of this study is the profile of the implementation of inclusive education in the Kebumen District Primary School shows an average of 59.6% in the medium category.



PENDAHULUAN

Kenyataan penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia masih belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan dan pedoman penyelenggaraan, baik dari segi siswa, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, dukungan orangtua dan masyarakat. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia saat ini masih menjadi fenomena yang menarik untuk dikembangkan.

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama teman-teman seusianya.

Pendidikan inklusi merupakan pendidikan formal baik secara kurikulum, manajemen, yang dapat diperuntukkan bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kemampuannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini secara tidak disadari sistem pendidikan sekolah luar biasa telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah lingkungan, dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan hak-hak mereka.

Strategi, metode, atau cara mengimplementasikan pendidikan inklusif di masing-masing Negara sangat bervariasi (UNESCO, 200; Stubbs, 2002). Keberagaman implementasi ini disebabkan karena tiap-tiap Negara memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Di samping itu, perbedaan implementasi ini juga terjadi ditingkat provinsi, kota, bahkan sekolah.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengimplementasikan pendidikan inklusif melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan dinas-dinas pendidikan di provinsi, Kota/Kabupaten. Dalam praktiknya, implementasi pendidikan inklusif menemui berbagai kendala dan tantangan. Kendala tersebut yang sering dilaporkan adalah kesalahpahaman tentang konsep pendidikan inklusif, peraturan atau kebijakan yang tidak konsisten, sistem pendidikan yang tidak luwes dan sebagainya.

Sejak pemerintah memperkenalkan dan mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, wacana tentang pendidikan inklusi telah menarik perhatian banyak kalangan, khususnya para penyelenggara pendidikan. Semakin meningkatnya perhatian terhadap pendidikan inklusif tidak secara otomatis implementasinya berjalan secara baik. Akan tetapi, berbagai pandangan dan sikap yang justru dapat menghambat implementasi pendidikan inklusi makin beragam. Oleh karena itu, pertanyaan tentang bagaimanakah profil implementasi pendidikan inklusif di Indonesia patut mendapat perhatian termasuk di Kabupaten Kebumen.

Kesuksesan pelaksanaan pendidikan inklusi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya faktor budaya, politik, dan sumber daya manusia (Kwon, 2005).

Keterlaksanaan pendidikan inklusif dapat dievaluasi dengan suatu indeks yang disebut *index for inclusion*. Indeks inklusi ini dibangun dari tiga dimensi, yaitu (1) dimensi Budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) dimensi praktik (*evolving inclusive practices*). Setiap dimensi dibagi dalam dua ranah, yaitu : dimensi budaya terdiri atas ranah membangun komunitas (*building community*) dan ranah membangun nilai-nilai inklusif (*establishing inclusive values*). Dimensi kebijakan terdiri atas ranah pengembangan tempat untuk semua

(*developing setting for all*) dan ranah melaksanakan dukungan untuk keberagaman (*organizing support for diversity*). Sedangkan dimensi praktik terdiri atas ranah belajar dan bermain bersama (*orchestrating play and learning*) dan ranah mobilisasi sumber-sumber (*mobilizing resources*).

Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan profil implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) di Kabupaten Kebumen. Indeks inklusi dijadikan ukuran utama untuk melihat nilai-nilai inklusi yang terjadi selama proses belajar-mengajar di kelas berlangsung. Selanjutnya, perbedaan indeks inklusi dianalisis atas dasar jumlah ABK, jumlah siswa keseluruhan di kelas, jumlah guru, dan pengalaman guru mengikuti pelatihan penanganan ABK.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui keberadaan ABK di sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Kebumen, (2) mengetahui indeks inklusi (*index for inclusion*) di sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Kebumen, dan (3) profil implementasi pendidikan inklusi di Kabupaten Kebumen.

METODE

Subjek penelitian ini adalah 10 kelas di 4 sekolah dasar yang memiliki siswa berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Kebumen yang dipilih secara proporsional yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah kelas di sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Data keberadaan ABK, jumlah siswa secara keseluruhan, jumlah guru, dan pengalaman guru mengikuti pelatihan tentang penanganan ABK diperoleh melalui wawancara dengan guru kelas. Sedangkan indeks inklusi diperoleh dengan observasi terhadap proses pembelajaran di kelas menggunakan daftar observasi yang didasarkan pada 18 indikator. Setiap indikator yang jelas teridentifikasi diberikan skor 3, yang ragu-ragu 2, dan yang tidak teridentifikasi 1, maka skor maksimal indeks inklusi yang dicapai adalah 54. Sedangkan profil implementasi pendidikan inklusi diperoleh dengan angket yang meliputi data umum sekolah, data khusus sekolah, dan data implementasi pendidikan inklusi dengan skor total indeks adalah 381.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan kelas inklusi ada kecenderungan jumlah anak berkebutuhan khusus antara 1 dan 3 dengan guru lebih dari satu yang terdiri dari guru kelas dan guru khusus. Jenis anak berkebutuhan khusus dengan *learning dissability* (LD) banyak ditemukan disamping anak yang mengalami autisme dan tuna daksa. Gejala ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa anak-anak dengan *learning dissability* dan autisme sering tidak tampak secara kasat mata (Golis, 1995), sehingga pada tahap awal belum dikenali sejak masuk sekolah. Akan tetapi, sering teridentifikasi setelah mengikuti proses pembelajaran. Hal semacam ini membuat sekolah mau menerima anak berkebutuhan khusus pada awalnya secara terpaksa, kemudian dapat menerima dengan motivasi yang sangat tinggi.

Dalam temuan hasil indeks inklusi ideal maksimal 54, ditemukan indeks tertinggi 50,6 dan terendah 27 dengan rata-rata 31,46. Hal ini menunjukkan bahwa inklusifitas yang dicapai dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolah dasar belum optimal. Data ini menunjukkan indeks inklusi tertinggi terjadi pada sekolah dengan jumlah siswa 20 orang, anak berkebutuhan khusus 3 dengan guru 5 orang. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah guru yang cukup memadai menjadi faktor yang menentukan untuk mencapai indeks inklusi yang tinggi.

Ditemukan bahwa indeks inklusi pada kelas dengan jumlah anak berkebutuhan khusus lebih tinggi daripada jumlah anak berkebutuhan khusus lebih sedikit. Sedangkan, jumlah siswa keseluruhan lebih sedikit, indeks inklusi lebih tinggi. Hasil

indeks inklusi tertinggi dicapai oleh kelas dengan jumlah guru yang lebih banyak dan pada kelas dengan guru yang lebih banyak mengikuti penataran dan pelatihan. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor jumlah anak berkebutuhan khusus, jumlah siswa keseluruhan, jumlah guru dan keikutsertaan penataran dan pelatihan berdampak pada perolehan indeks inklusi dalam pembelajaran di kelas.

Kelas yang memiliki guru dengan pengalaman mengikuti penataran dan pelatihan tentang penanganan anak berkebutuhan khusus yang lebih banyak indeks inklusinya lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan penataran dan pelatihan memberikan dampak pada guru dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan inklusi di kelas. Pelatihan dan penataran secara efektif dapat mengubah perilaku seseorang dimana dengan perubahan sikap seseorang memiliki 3 aspek yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Diberikannya informasi pengetahuan yang benar seseorang menjadi lebih baik dengan pengetahuan yang benar mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang benar. Dengan gambaran semacam ini dapat diduga bahwa guru yang mengikuti penataran dan pelatihan menyebabkan mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusi dalam pembelajaran yang benar.

Penggunaan instrumen untuk menggali indeks inklusi memiliki 18 indikator yaitu : indikator 1 perencanaan, indikator 2 saling berkomunikasi, indikator 3 pemahaman perbedaan, indikator 4 partisipasi, indikator 5 aktivitas yang melecehkan anak, indikator 6 keterlibatan siswa, indikator 7 penilaian, indikator 8 kerjasama, indikator 9 aktivitas kegiatan siswa, indikator 10 saling menghormati, indikator 11 bantuan pembelajaran, indikator 12 mengambil bagian, indikator 13 pengaturan kelas, indikator 14 sumber bahan pelajaran, indikator 15 perbedaan individu, indikator 16 pemanfaatan sumber ahli, indikator 17 pengembangan sumber, dan indikator 18 pemanfaatan sumber.

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 kelas yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, ditemukan jumlah anak berkebutuhan khusus bervariasi dari 1-3, dimana kelas inklusi dengan 2 anak berkebutuhan khusus paling banyak ditemukan. Sedangkan jumlah siswa keseluruhan paling sedikit 22 dan paling banyak 38. Pada kelas inklusi yang memiliki anak berkebutuhan khusus terdapat guru lebih dari 1, satu guru utama dibantu oleh satu guru khusus, ada beberapa kelas inklusi terdapat guru yang hanya satu. Pada kelas inklusi yang ada anak berkebutuhan khusus keadaan yang paling ideal jika ada guru kelas dan guru khusus. Guru khusus yang dimaksud yaitu guru yang memiliki latar belakang pendidikan khusus yang bertindak sebagai guru konsultan bagi guru kelas. Di negara yang telah maju, mewajibkan setiap sekolah yang memiliki siswa anak berkebutuhan khusus menyediakan guru khusus. Keadaan di Indonesia ada kecenderungan sekolah inklusi yang memiliki siswa anak berkebutuhan khusus mulai menyediakan guru khusus. Ketersediaan guru khusus ini ada yang disediakan oleh sekolah inklusi itu sendiri dan adapula yang disediakan oleh orangtua.

Temuan hasil penelitian untuk profil implementasi pelaksanaan pendidikan inklusi berdasarkan data umum sekolah adalah 11 dengan standar nilai ideal 19. Berdasarkan data khusus sekolah adalah 82 dengan standar nilai ideal 138. Sedangkan implementasi pendidikan inklusi dengan aspek kelembagaan 23; kurikulum 10; pembelajaran 20; penilaian 23; kesiswaan 23; ketenagaan 19; sarana prasarana 11; dan pembiayaan 5. Dengan demikian standar nilai adalah 134 dengan standar nilai ideal 224. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa profil pelaksanaan pendidikan inklusi di Kabupaten Kebumen menunjukkan rerata 59,6.

Dengan demikian, profil Implementasi pendidikan inklusi menunjukkan kategori sedang yang tentunya masih membutuhkan pengembangan dalam pelaksanaannya dan mencari kelemahan-kelemahannya untuk dapat di optimalkan menuju implementasi secara ideal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta rumusan masalah, maka dapat disampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dan memiliki siswa berkebutuhan khusus memerlukan guru khusus selain guru kelas. Guru khusus tersebut biasanya sebagai guru konsultan dengan latar belakang pendidikan khusus.
2. Indeks inklusi merupakan gambaran seberapa jauh proses pembelajaran di kelas menunjukkan inklusifitas. Indeks inklusi yang dicapai sekolah dasar di Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan pendidikan inklusi sebesar 31,46 dari indeks maksimal 54 hal ini menggambarkan bahwa inklusifitas dalam pembelajaran di sekolah dasar tersebut belum ideal.
3. Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kabupaten Kebumen sebesar 227 dari indeks maksimal 381. Hal ini menggambarkan bahwa profil pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar di Kabupaten Kebumen belum ideal. Konsekuensi logis dari simpulan ini adalah perlu adanya pengembangan penyelenggaraan sekolah inklusi di sekolah dasar di Kabupaten Kebumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, Amanda Ajodhia& Frankel, Elaine. (2010). Inclusive Education in Guyana : A Call For Change. *International Journal of Special Education*. 25 (1).
- Bandi Delphie. 2006. *Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung : Refika Aditama.
- Budhi Wibhawa, Santoso T. Raharjo, Meilany Budiarti S. 2010. *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*, Bandung : Widya Padjadjaran.
- Booth, T. Ainscow, M. (2002). *Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in School*. London : CSIE.
- Davies Brent, Ellison Linda, (1998) "Futures and strategic perspectives in school planning", *International Journal of Educational Management*, Vol. 12 Issue : 3, pp. 133-140, <https://doi.org/10.1108/09513549810209130>
- Golis, S.A. et al. (1995). *Inclusion in Elementary Schools : a Survey and policy Analysis. A peer-reviewed scholarly electronic*. *Journal Education Policy Analysis Archives*. 3-15.
- Hui, N., Vickery, E., Njelesani, J., & Cameron, D. (2017). Gendered Experience of Inclusive Education for Children With Disabilities in West and East Africa. *International Journal of Inclusive Education*, 1-18.
- Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus. "Proses Pembelajaran Dalam Setting Inklusi Di Sekolah Dasar. Vol. 1, No. 1, Januari 2012
- Jurnal Pendidikan Khusus. Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Vol. 7, No. 2, November 2010
- Kwon, H. (2005). *Inclusion in South Korea : The Current Situation and Future Directions*. *International Journal of Disability, Development and Education*. 52, 1, 59-68.
- Mega Iswari. 2007. *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : Depdiknas
- Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : PT Aprimary schooli Mahasatya.
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Stubbs, Sue. 2002. *Inclusive Education Where There Are Resources : The Atlas Alliance*.

- Tarmansyah. 2012. Pedoman Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah Inklusif. Padang : Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus primary school Layanan Khusus
- UNESCO. (2002). *Open File on Inclusive Education*. Support Materials for Managers and Administrators.
- Valdivia, I. M., & Montoto, I. G. (2017). Teacher's Intercultural Competence: a Requirement or An Option in a Culturally Diverse Classroom. *International Journal of Inclusive Education* , 1-17.